Jurnal Akuntan Publik
Volume 2, Nomor 4 Tahun 2024
e-ISSN: 2986-4496; p-ISSN: 2986-447X, Hal 01-17
DOI: https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v2i4.4317
Available Online at : https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jap-widyakarya

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. TTU

Carolin Stephanie Serafin Meko [1*],Maria Prudensiana Leda Muga [2], Novi Theresia Kiak [3]
[1-3] Universitas Nusa Cendana, Indonesia
Email : stephaniemeko22@gmail.com [1] , maria.muga@staf.undana.ac.id [2], novi.kiak@staf.undana.ac.id [3]

Alamat: Jl. Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Korespondensi penulis: stephaniemeko22@gmail.com *

Abstract*. This research aims to determine the influence of regional financial management, regional financial accounting systems, and human resource competence on the quality of regional government financial reports in TTU Regency, partially or simultaneously. This research uses a quantitative research approach. This research uses primary data. The sampling technique in this research was purposive sampling with respondents consisting of 36 respondents who were at the Regional Financial and Asset Agency in TTU Regency. Where data is collected through questionnaires distributed, and the analysis is based on respondents' answers obtained through questionnaires distributed by researchers. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis with the help of the SPSS 25 program. The results of this study state that regional financial management does not have a significant effect on the quality of financial reports, while the regional financial accounting system and human resource competency have a significant effect on the quality of regional government financial reports, and of the three regional financial management variables, the regional financial accounting system and human resource competency together have a significant effect on the quality of regional government financial reports.*

Keywords*: Regional Financial Management, Regional Financial Accounting System and Human Resource Competence, Quality of Regional Government Financial Reports*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten TTU secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan responden yang terdiri 36 responden yang berada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten TTU. Dimana data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan, dan analisisnya didasarkan pada jawaban responden yang diperoleh melalui kuesioner yang didistribusikan oleh peneliti. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 25. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan dari ketiga variabel pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: *Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah tahun 2014 yaitu Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara

Received Oktober 15, 2024; Revised Oktober 28, 2024; Accepted November 26, 2024; Online Available: November 30, 2024

Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggungjawab (Irmadiani, 2022).

Akibat dari pendelegasian kewenangan dan penyerahan dana tersebut tentu adalah kebutuhan akan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan daerah adalah dengan disusunnya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Maka, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang memberikan gambaran kondisi pemerintah pusat mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) (Pujanira, 2017).

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah 71 tentang Laporan Keuangan, 2010) laporan keuangan merupakan laporan berstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Hal ini dapat dilihat pada realisasi APBD Kabupaten TTU yang penyerapan setiap tahunnya cenderung stabil.

Tabel 1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. TTU 2021-2023

APBD Tahun	Pendapatan	Realisasi	%
2021	1.029.787.534.398,00	994.450.427.004,10	96,57
2022	1.164.012.417.890,00	1.059.547.462.750.17	91,03
2023	1.070.538.901.010,16	1.044.254.212.651,46	97,54

Sumber: BKAD tahun 2021-2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021-2023 realisasi anggaran di Kabupaten TTU belum mencapai target 100%. Hal ini dikarenakan beberapa hal antara lain: objek pendapatan yang terealisasi belum mencapai target, penetapan target yang tidak sesuai dengan potensi target pendapatan, dan belum semua wajib pajak membayar pajak daerah. Sementara itu, pendapatan per tahun di Kabupaten TTU berbeda-beda tergantung pada dana insentif dan bagi hasil daerah dengan provinsi. Meskipun capaian target setiap tahun belum mencapai 100%, namun apabila dilihat pada data opini LKPD di Kabupaten TTU menunjukkan bahwa pada tahun 2021-2023 Kabupaten TTU mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2019-2023

No	Entitas	Opini atas LKPD TA				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Timor Tengah Utara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BKAD Kabupaten TTU, 2019-2022

Tabel di atas, menunjukkan pada tahun 2019 mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian, dengan beberapa kendala dalam menyusun laporan keuangan. Sementara pada tahun 2020-2023 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, dimana tidak ada kendala spesifik dalam penilaian tersebut. Wajar Tanpa Pengecualian ini diperoleh karena di BKAD sudah memenuhi kriteria seperti siklus anggaran yang tepat waktu, pengelolaan aset yang sudah ditindak lanjuti dan sejalan, dan pembenahan aset pada tahun 2020-2023 sudah sesuai dengan kondisi dan ketentuan.

Terlepas dari kriteria pemenuhan WTP di atas, menurut hasil laporan pemeriksaan dan LKPD yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Negara Badan Keahlian DPR RI tahun 2020 terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi Kabupaten TTU misalnya kendala pada penatausahaan aset personil, sarana dan prasarana, dan dokumen. Memperhatikan kondisi di atas, untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kabupaten TTU maka Badan Keuangan dan Aset Dareah sebagai instansi pengelola laporan keuangan daerah perlu memperhatikan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM pengelola laporan keuangan daerahnya.

Berdasarkan informasi yang dirangkum dari BKAD Kabupaten TTU masih terdapat beberapa kendala internal dan eksternal dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun kendala-kendala internal antara lain: pertama, kurangnya personil pada bidang akuntansi yang mengelola laporan keuangan. Saat ini, PNS pada bidang akuntansi berjumlah 8 orang Sarjana Ekonomi (Manajemen) yang bertugas untuk menangani laporan keuangan dari 64 OPD di Kabupaten TTU. Kedua, kurangnya pelatihan dan pengalaman kerja. Ketiga, pendidikan formal yang tidak sesuai dengan bidang yang mengelola laporan keuangan. Sedangkan kendala eksternal berasal dari sumber daya pengelola laporan keuangan pada OPD lain di Kabupaten TTU yang mana pelaporan yang disampaikan ke BKAD Kabupaten TTU tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan untuk mengoreksi, memverifikasi, dan mengkompilasi ketetapan laporan-laporan tersebut.

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau protesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi

mencakup penguasaan ilmu pengetahuan *(knowledge),* dan keterampilan *(skill*) yang mencakupi, serta mempunyai sikap/perilaku *(attitude)* yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya (Agoes, 2012). Sejalan dengan hal tersebut dapat dilihat bahwa jika SDM dari aparatur pemerintahan masih lemah maka dapat menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan menjadi kurang handal dan relevan (Harahap, 2018). Sementara laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Stewardship *(Stewardship Theory)*

Teori *stewardship* menggambarkan bahwa tidak ada suatu kejadian situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan- tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi (Donaldson, Lex dan Davis, 1991). Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah Steward sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal (Lewier, 2016).

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas sebagai "kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan" (Mulyana, 2010). Berdasarkan definisi tersebut tampak bahwa kualitas merujuk pada pengertian pemenuhan standar atau persyaratan tertentu yang mana hal tersebut dinilai melalui hasil pertanggungjawaban suatu entitas, baik dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2019:24). Keuangan negara harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, serta bertanggung jawab. Proses pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah yang terdapat dalam suatu instansi harus

dikelola sedemikian rupa agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang baik mencakup 4 karakteristik pengelolaan keuangan yaitu, 1) Efektif; 2) Efisien ; 3) Transparansi; dam 4)Akuntabilitas (Halim dkk., 2019:29).

Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (Ratmono, 2017:58). Sistem akuntansi keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan maka laporan keuangan yang akan dihasilkan juga akan jadi lebih baik dan berkualitas, penyampaian informasi keuangan, agar informasi dapat disampaikan secara tepat, cepat, dan akurat untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas, maka perlu adanya suatu sistem informasi yang baik untuk penyampaian dan penyusunan laporan keuangan sehingga sesuai dengan kualitas yang diharapkan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah karakteristik pengetahuan, keterampilan, perilaku dan pengalaman yang dimiliki manusia untuk melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia maka waktu pembuatan laporan keuangan akan dapat dihemat. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya (Wirawan, 2009:9).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan jenis penelitian survei, yang bertujuan untuk memperoleh data dari objek penelitian melalui kuesioner yang diberikan kepada responden. Data yang digunakan terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif, dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Penelitian dilaksanakan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten TTU pada Juli 2024 hingga selesai. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai BKAD Kab. TTU, berjumlah 36 orang, yang sekaligus menjadi target sampel penelitian setelah kuesioner disebarkan. Teknik pengumpulan data Menggunakan metode kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Uji Kualitas Data meliputi uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen penelitian. Uji Asumsi Klasik Dilakukan melalui uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji

heteroskedastisitas untuk memastikan data memenuhi asumsi regresi linier berganda. Analisis Data menggunakan analisis Regresi Linier Berganda: Digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi dinyatakan sebagai: $Y=\alpha+\beta1X1+\beta2X2+\beta3X3+\beta4X4+e$. Dan Uji Hipotesis dilakukan melalui Uji t untuk pengaruh parsial, Uji F untuk pengaruh simultan serta Koefisien Determinasi (R^2) untuk mengukur kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN (Sub judul level 1)

Analisis Data Statistik Deskriptif

Tabel 3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistics					
		Pengelolaan Keuangan	Sistem Akuntansi	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kualitas Laporan Keuangan
N	Valid	36	36	36	36
	Missing	0	0	0	0
Mean		66,47	103,72	94,06	51,39
Median		64,50	97,00	92,00	48,00
Mode		75	96	103	48
Std. Deviation		5,624	10,503	13,253	5,531
Minimum		58	94	75	46
Maximum		75	120	121	60
Sum		2393	3734	3386	1850

Tabel menunjukkan penggambaran data yang digunakan dalam penelitan ini yaitu sebagai berikut:

1. Variabel pengelolaan keuangan daerah memiliki jumlah sampel sebanyak 36, dengan nilai minimum 58, nilai maksimum 75 dan nilai *mean* (nilai rata-rata) sebesar 66,47 *standard deviation* atau simpangan baku sebesar 5,624.
2. Variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki jumlah sampel sebanyak 36, dengan nilai minimum 94, nilai maksimum 120 dan nilai *mean* (nilai rata-rata) sebesar 103,72 *standard deviation* atau simpangan baku sebesar 10,503.
3. Variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki jumlah sampel sebanyak 36, dengan nilai minimum 75 nilai maksimum 121 dan nilai *mean* (nilai rata-rata) sebesar 94,06 *standard deviation* atau simpangan baku sebesar 13,253.

4. Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki jumlah sampel sebanyak 36, dengan nilai minimum 46 nilai maksimum 60 dan nilai *mean* (nilai rata-rata) sebesar 51,39, *standard deviation* atau simpangan baku sebesar 5,531.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas terhadap instrument pertanyaan dari variabel pengelolaan keuangan daerah (X1), sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah (X2), kompetensi sumber daya manusia (X3) dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) tersebut, didapatkan hasil r-hitung yang kemudian dibandingkan dengan nilai r-tabel sebesar 0,329. Hasil uji menunjukkan nilai r-hitung dari semua pertanyaan memiliki nilai lebih besar dari r-tabel sehingga instrument-instrument pertanyaan tersebut dapat dinyatakan valid dan dapat digunakan.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 4. Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach's Alpha*	Ket
Pengelolaan Keuangan Daerah	0,767	*Reliable*
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,767	*Reliable*
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,754	*Reliable*
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,780	*Reliable*

Sumber data: diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa uji reliabilitas yang dilakukan terhadap instrument pertanyaan dinyatakan valid. Hasil koefisien variabel pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar alpha = 0,767 sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah sebesar alpha = 0,767, variabel kompetensi sumber daya manusia adalah sebesar alpha = 0,754 dan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar alpha = 0,780, di mana nilai tersebut memilliki nilai *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0,60. Hal ini berarti keempat variabel di atas dinyatakan memenuhi syarat atau reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 5. Uji Normalitas

Kolmogorov Smirnov Test			
	Statistic	***Df***	***Sig.***
Unstandardized Residual	0,128	36	0,144

Sumber data: diolah peneliti, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa, setelah dilakukannya pengujian statistik *Kolmogorov smirnov*. Diketahui nilai signifikansinya sebesar 0.144 yang artinya dapat dikatakan bahwa nilai data tersebut terdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 6. Uji Multikolinieritas

Coefficients[a]			
Model		*Collinearity Statistics*	
		Tolerance	VIF
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	0,220	4,547
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,217	4,603
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,474	2,112
a. *Dependent Variable*: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			

Sumber data: diolah peneliti, 2024

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

a. Variabel pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,220 yang lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF sebesar 4,547 yang lebih kecil dari 10 yang dinyatakan bebas dari multikolinieritas.
b. Variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,217 yang lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF sebesar 4,603 yang lebih kecil dari 10 yang dinyatakan bebas dari multikolinieritas.
c. Variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,474 yang lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF sebesar 2,112 yang lebih kecil dari 10 yang dinyatakan bebas dari multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 7. berikut ini.

Tabel 7. Uji Heteroskedastisitas

Correlations						
			Pengelolaan Keuangan	Sistem AK	Kompetensi	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Pengelolaan Keuangan	Correlation Coefficient	1,000	.785**	.658**	-0,027
		Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,875
		N	36	36	36	36
	Sistem Akuntansi	Correlation Coefficient	.785**	1,000	.571**	0,040

		Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,819
		N	36	36	36	36
	Kompetensi SDM	Correlation Coefficient	.658**	.571**	1,000	-0,101
		Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,559
		N	36	36	36	36
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-0,027	0,040	-0,101	1,000
		Sig. (2-tailed)	0,875	0,819	0,559	
		N	36	36	36	36

Sumber data: diolah peneliti, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Pengelolaan keuangan daerah (X1) sebesar 0,875, Sistem akuntansi keuangan daerah (X2) sebesar 0,819 dan variabel Kompetensi sumber daya manusia (X3) sebesar 0,559 yang artinya tidak terjadi masalah atau gejala heterokedastisitas, dikarenakan variabel X_1, X_2 dan X_3 memiliki nilai signifikansinya > 0,05.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,435	4,345		-0,330	0,743
	Pengelolaan Keuangan	0,220	0,137	0,223	1,599	0,120
	Sistem Akuntansi	0,255	0,074	0,484	3,441	0,002
	Kompetensi SDM	0,125	0,040	0,301	3,156	0,003
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan						

Sumber data: diolah peneliti, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil analisis data yang menggunakan aplikasi SPSS 25, maka diperoleh hasil perhitungan persamaan regresi linear berganda yaitu:

$Y = -1,435 + 0,220X1 + 0,255X2 + 0, 125X3 + e$

Persamaan regresi tersebut memperlihatkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial, dimana dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah sebesar -1,435 yang artinya jika X1, X2 dan X3 = 0 maka Y= -1,435.
2. Nilai koefisien regresi pengelolaan keuangan daerah (X1) bernilai positif yaitu 0,220 dimana hasil ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel pengelolaan keuangan daerah sebesar 1 unit, maka akan meningkatkan pendeteksian nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,220 dengan satuan asumsi variabel independen lainnya tetap, dimana variabel X1 berpengaruh positif terhadap Y.
3. Nilai koefisien regresi sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah (X2) bernilai positif yaitu 0,255 dimana hasil ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sebesar 1 unit, maka akan meningkatkan pendeteksian nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,255 dengan satuan asumsi variabel independen lainnya tetap dimana, variabel X2 berpengaruh positif terhadap Y.
4. Nilai koefisien regresi dari variabel kompetensi sumber daya manusia (X3) memiliki nilai positif yaitu 0,125, dimana hasil ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 1 unit, maka akan meningkatkan pendeteksian nilai variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 0,125 dengan satuan asumsi variabel independen lainnya tetap, dimana variabel X3 berpengaruh positif terhadap Y.

Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independent secara individu terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Diketahui nilai t-tabel pada penelitian ini yaitu:

Tabel 9. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,435	4,345		-0,330	0,743
	Pengelolaan Keuangan	0,220	0,137	0,223	1,599	0,120
	Sistem Akuntansi	0,255	0,074	0,484	3,441	0,002
	Kompetensi SDM	0,125	0,040	0,301	3,156	0,003

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber data: diolah peneliti,2024

a. Berdasarkan hasil perhitungan variabel pengelolaan keuangan daerah (X_1) memiliki nilai t-hitung sebesar 1,599 dan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,120>0,05. Nilai t-tabel = t (a/2; n-k-1) = t (0,05/2; 36-3-1) = (0,025; 32) = 2,03693. Maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis pertama (H_1) tentang pengelolaan keuangan daerah berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial ditolak.
b. Berdasarkan hasil perhitungan variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X_2) memiliki nilai t-hitung sebesar 3,441 dan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,002<0,05. Nilai t-tabel = t (a/2; n-k-1) = t (0,05/2; 36-3-1) = (0,025; 32) = 2,03693. Maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis kedua (H_2) tentang sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial diterima.
c. Berdasarkan hasil perhitungan, variabel kompetensi sumber daya manusia (X_3) memiliki nilai t-hitung sebesar 3,156 dan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,003<0,05. Nilai t-tabel = t (a/2; n-k-1) = t (0,05/2; 36-3-1) = (0,025; 32) = 2,03693. Maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis ketiga (H_3) tentang kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial diterima.

Uji Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis secara simultan atau bersama merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi linear berganda dengan X_1, X_2 dan X_3 secara bersama-sama mempengaruhi Y (Ghozali, 2018). Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi nilai F-hitung > F-tabel, maka model yang dirumuskan sudah tepat. Dalam mencari nilai F-tabel maka digunakan rumus:

Df(n1) = k-1 = 2-1

Df(n2) = n-k-1 = 36-3-1 = 32

Hasil yang diperoleh untuk F-tabel adalah sebesar 4,15

Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai F-hitung > nilai F-tabel dan nilai signifikan < *alpha* (menggunakan signifikan 0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara berasama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.12 berikut.

Tabel 10. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	923,418	3	307,806	66,943	.000[b]
	Residual	147,137	32	4,598		
	Total	1070,556	35			
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan						
b. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi						

Sumber data: diolah peneliti, 2024

Tabel 4.12 menunjukkan nilai F-hitung sebesar 66,943 dan tingkat signifikansi 0,000. Berdasarkan presentase distribusi nilai F-tabel = 4,15. Hal ini berarti F-hitung > nilai F-tabel dengan tingkat signifikansi < 0,05 dapat disimpulkan bahwa variabel pengelolaan keuangan daerah (X1), sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah (X2) dan kompetensi sumber daya manusia (X3) secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) pada BKAD Kab. TTU.

2. Koefisien Determinasi *(Adjusted R^2)*

Tabel 11. Uji Koefisien Determinasi *(Adjusted R^2)*

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.929[a]	0,863	0,850	2,144
a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi				

Sumber data: diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 4.13 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi terdapat pada nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,850 atau 85%. Nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan variabel pengelolaan keuangan daerah (X1), sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah (X2) dan kompetensi sumber daya manusia (X3) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) adalah sebesar 85%, sedangkan sisanya 15% dijelaskan oleh variabel atau faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti sistem pengendalian internal, dan motivasi kerja.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian dari hipotesis (H_1), menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah (X_1) berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) Kabupaten TTU. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perhitungan uji t yang menyatakan bahwa t-hitung sebesar 1,599 dan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,120>0,05. Nilai t-tabel = t (a/2; n-k-1) = t (0,05/2; 36-3-1) = (0,025; 32) = 2,03693, yang berarti nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel (t-hitung < t-tabel). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan belum sesuai dengan peraturan dan ketetapan pemerintah. Ketidaksignifikan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah dapat disebabkan terdapat faktor lain dalam pelaporan keuangan seperti ketidakefektif dan transparan dalam suatu instansi yang belum memiliki integritas jujur dalam bekerja.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori *Stewardship*, dimana dalam teori ini menganggap pengelolaan keuangan daerah memiliki peran dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Defitri, (2018) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2018) dan Sholikah dkk, (2016) yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil dari pengujian hipotesis (H_2) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perhitungan uji t yang menyatakan bahwa thitung sebesar 3,441 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002<0,05, serta memiliki nilai dari ttabel sebesar 2,03693 yang berarti nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel (t-hitung > t-tabel). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan yang baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan uang berkualitas, ini terjadi karena semakin tinggi pemahaman seseorang tentang sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah maka akan sangat membantu dalam proses penyusunan suatu laporan keuangan yang berkualitas dan sistem akuntansi yang transparan memfasilitasi akuntabilitas

dan memungkinkan pihak terkait untuk memahami dan mengevaluasi laporan keuangan dengan lebih baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengen teori Stewardship dimana pemerintah daerah selaku Steward memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan keuangan yang dilaporkan sebagai pertanggungjawaban kinerjanya. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sholikah dkk, (2016) dan Hanifa (2016) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil dari pengujian hipotesis (H3) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia (X3) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perhitungan uji t yang menyatakan bahwa thitung sebesar 3,156 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003<0,05, serta memiliki nilai dari ttabel sebesar 2,03693 yang berarti nilai thitung lebih besar dari nilai t-tabel (t-hitung > t-tabel). Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki peran dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan organisasi sehingga berjalan dengan baik serta kegiatan dapat diselesaikan secara profesional, efektif dan efisien.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *Stewardship* dimana pemerintah daerah selaku *steward* menekankan bahwa karyawan tidak hanya sebagai aset yang harus dikelola, tetapi juga sebagai pemilik yang memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh Ropiyantie (2012) yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis simultan yang diajukan yaitu pengaruh pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia secara bersama- sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan uji *adjusted R square* yang menunjukkan nilai *cronbach alpha* sebesar 0,850

atau 85%. Nilai ini menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan variabel pengelolaan keuangan daerah (X1), sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah (X2) dan kompetensi sumber daya manusia (X3) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) adalah sebesar 85%, sedangkan sisanya 15% dijelaskan oleh variabel atau faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Teori stewardship yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan pengelolaan keuangan daerah menekankan pentingnya tanggung jawab dan kepercayaan dalam penggunaan sumber daya publik. Pemimpin daerah dianggap sebagai steward yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan sumber daya keuangan, mereka harus memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Defitri (2018) dan Pujanira (2017) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan pemerintah, yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakefektifan, kurang transparansi, dan rendahnya integritas di instansi terkait. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan sistem akuntansi keuangan yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi SDM yang baik memungkinkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian organisasi secara profesional, efektif, dan efisien sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan. Secara simultan, pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman sistem akuntansi yang baik dan peningkatan

kompetensi SDM untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan berkualitas.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, disarankan agar pemerintah daerah lebih memperhatikan proses pembuatan laporan keuangan, mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan, untuk memastikan hasil yang berkualitas. Pemerintah juga perlu memberikan pelatihan berkelanjutan kepada para pembuat laporan keuangan, sehingga mereka memiliki pengetahuan dasar yang memadai untuk menghindari hambatan dalam penyusunan laporan secara efisien dan tepat waktu. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan wawancara sebagai tambahan metode pengumpulan data agar informasi yang diperoleh lebih terperinci. Penelitian juga dapat dilakukan pada lebih dari satu instansi di Kabupaten TTU atau institusi lain, seperti bank atau koperasi, untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Selain itu, sebaiknya ditambahkan indikator lain, seperti pendidikan, pelatihan, dan komitmen pimpinan daerah, untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat.

DAFTAR REFERENSI

Agoes, S. (2012) *Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

BPK (2020) *Opini Bpk Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Ta 2020*.

Darmawan, A., & D. (2018) 'Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi Sumberdaya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpa Provinsi Aceh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, 1(3), Pp. 9–19.

Defitri, S.Y. (2018) 'Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah', *Jurnal Benefita*, 3(1), P. 64. Available At: Https://Doi.Org/10.22216/Jbe.V3i1.2376.

Donaldson, Lex Dan Davis, J.H. (1991) 'Stewardship Theory Or Agency Theory: Ceo Governance And Shareholders Return.', *Australian Journal Of Management*, 1(16), Pp. 49–64.

Ghozali (2016) *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program Ibm Spss*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Halim, A. (2013) *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Harahap, S.S. (2018) *Analisis Kristis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Irmadiani, N.D. (2022) 'Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi

Kasus Pada Bpkad Kabupaten Bogor)', *Pulic Service And Governance Journal*, 03(01), Pp. 67–79.

Lewier, C.N. (2016) 'Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten'.

Mulyana, D. (2010) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Tentang Laporan Keuangan (2010).

Pujanira, P. (2017) 'Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy:(4).

Ratmono, D. And Solihin, M. (2017) *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.

Ropiyantie, D. (2012). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Accounting*, *1*(1).

Sholikah, R.Nur.D.S.P.A. Dan M.R. And Sunarko (2016) 'Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Kuangan (Studi Pada Kantor Dppkad Kab. Boyolali)', *E-Journal Unisri Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi.* 12, Pp. 168–175.

Sugiyono, Prof.Dr. (2022) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Edisi 2. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).

Wirawan (2009) *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.